

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB

Nomor: Kep/ **1** /II/2026

tentang

RENCANA STRATEGIS SATKER BID TIK POLDA NTB TAHUN 2025-2029
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan jangka menengah Satker Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTB, maka disusun Rencana Strategis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTB tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTB, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: Sprin/831/VI/REN.1.2./2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis, peta strategis dan Indikator Kinerja Utama Polda NTB Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Kabid TIK Polda NTB Nomor: Sprin/39/II/REN./2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis, Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bidang TIK Polda NTB tahun 2025-2029.

/Memperhatikan.....

Memperhatikan: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB TENTANG RENCANA STRATEGIS SATKER BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB TAHUN 2025-2029.**

1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029 terdiri dari:
 - a. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I;
 - b. Penjelasan pengukuran Manual IKU dan IKP Polda NTB tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II.
2. Rencana Strategis dan Penjelasan pengukuran Manual IKU dan IKP Satker Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTB, agar dapat menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTB;
3. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : **18** Februari 2026



KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB

YAYAN HARTADI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

RENCANA STRATEGIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI POLDA NTB TAHUN 2025-2029

I. PENDAHULUAN

A. Kondisi umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rancangan Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

/Polri

Polri sebagai lembaga negara dan Bid TIK Polda NTB khususnya dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Bid TIK Polda NTB juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan kedalam arah kebijakan dan strategi Bid TIK Polda NTB. Selanjutnya, Renstra Bid TIK Polda NTB ini menjadi acuan penyusunan Renja Bid TIK Polda NTB, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bid TIK Polda NTB.

Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Bid. TIK Polda NTB tetap dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan strategis. Potensi dan permasalahan Polri yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Bid TIK Polda NTB.

B. Potensi

1. Perhubungan Korem 162/WB beserta jajarannya dapat dikoordinasikan dalam rangka membantu jaringan komunikasi Polri terutama bagi Kesatuan Polri yang jaring komunikasinya cukup rawan;
2. PT.Telkom Mataram dengan jajarannya dapat dikoordinasikan dalam rangka mendukung kelancaran dalam operasional Vicon;
3. PT.Telkomsel dengan jajarannya dapat dikoordinasikan dalam rangka mendukung penggelaran jaringan internet di Polsek yang belum terjangkau infrastruktur TI;
4. Potensi radio konsensi dan amatir radio yang berada di daerah Operasi merupakan potensi wilayah yang dapat didayagunakan sebagai unsur bantuan dalam pengawasan Radio pemancar dikalangan masyarakat;
5. Potensi radio siaran pemerintah (RRI) dan radio siaran swasta merupakan unsur kekuatan dalam rangka penyuluhan/penerangan kepada masyarakat.

/C. Analisa

C. Analisa SWOT

1. Kekuatan

- a. Jumlah personel Bidang TIK Polda NTB yang memiliki kualifikasi dibidang teknologi komunikasi dan informatika
- b. Peralatan yang terdiri dari berbagai jenis khususnya dibidang komunikasi dan informatika mulai tercukupi sampai dengan tingkat Polsek;
- c. Tergelarnya jaringan Intranet Polri / VPN - IP di Polda NTB dan Polres jajaran untuk keperluan antara lain Vicon, Sislaphar, Sisbinkar, AVIS, TNCC, CETS, Interpol dan Piknas;
- d. Tergelarnya jaringan komunikasi elektronik yang memadai jajaran Polda NTB;
- e. Tergelarnya jaringan untuk mengakses pengaduan masyarakat melalui contact center Polri 110 dan pemanfaatan Aplikasi Gatarin Sakti;
- f. Tergelarnya jaringan Internet di Polda NTB dan Polres jajaran untuk keperluan akses informasi global, pengiriman data via e-mail dan keperluan dinas lainnya;
- g. Dukungan peralatan Fly Away V-Sat dalam memberikan laporan secara online dalam kegiatan operasional Kepolisian di lapangan.

2. Kelemahan

- a. Masih kurangnya Personel yang professional khususnya dibidang Alkomlek;
- b. Masih terbatasnya personel Bidang TIK Polda NTB dan belum sesuai dengan DSP;
- c. Belum tersedia up-date Alkomlek yang sesuai dengan karakteristik wilayah hukum Polda NTB;
- d. Masih kurangnya dukungan anggaran melaksanakan Tupuoksi TIK Polda NTB.

3. Peluang

- a. Adanya kerjasama dengan stekholder (instansi terkait) di bidang komunikasi seperti Orari, Rapi, PT. Telkom dan Operator Celular dalam mencegah aksi teror dengan jaringan komunikasi;
- b. Terjalinnya kerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia seperti pelatihan manajemen frekuensi yang bekerjasama dengan LAPAN serta pelatihan komputer yang bekerjasama dengan AMIKOM Mataram dan PT Telkom;

/4. Ancaman...

4. Ancaman

Tidak maksimalnya Up-date data informasi yang diterima atau yang akan disampaikan sehingga terhambatnya tugas Polri pada wilayah hukum Polda NTB.

5. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Bid TIK Polda NTB dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda NTB antara lain:

- a. Masih adanya personel yang kurang terampil dibidang Alkomlek dan Teknologi Informasi;
- b. Belum maksimalnya pengembangan sistem informasi online di tingkat satker Polda, Polres sampai dengan tingkat Polsek;
- c. Terbatasnya tenaga yang ahli dibidang Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- d. Masih terdapatnya sistem daerah yang memiliki Topografi berbukit dan bergunung belum dijangkau jaringan komunikasi elektronik;
- e. Masih minimnya sarpras untuk pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Belum tergelarnya perangkat Alkomlek di pulau – pulau terluar berpenghuni di wilayah hukum Polda NTB.

II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS POLDA NTB, BID TIK POLDA NTB DAN PROGRAM PEMERINTAH

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bid TIK Polda NTB dan latar belakang tersebut di atas dengan dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan daerah Nusa Tenggara Barat dan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal serta analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, maka Bid TIK Polda NTB menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu

institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

/Dengan...

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Bid TIK Polda NTB dalam menjabarkan Visi dan Misi berdasarkan pada Visi dan Misi Polda NTB dimana juga berpedoman pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2025-2029.
4. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian daerah.

Adapun penjabaran Visi, Misi , Tujuan, Sasaran Strategis, Keterkaitan dan pentahapan kebijakan Polda NTB dan Bid TIK Polda NTB adalah sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Tahapan Kebijakan Polda NTB

a. Visi

“Terwujudnya Wilayah Hukum Polda NTB aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat”

b. Misi

“Melindungi, melayani dan Mengayomi masyarakat di Wilayah Hukum Polda NTB”

/c. Tujuan....

c. Tujuan

Tujuan Polda NTB merupakan penjabaran Visi dan Misi Polri dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan Polda NTB pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki Polda NTB. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan Polda NTB yang akan dituju pada tahun 2029 yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel”.

d. Sasaran strategis

- 1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- 2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan menyeluruh;
- 4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
- 5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

e. Penahapan kebijakan.

1) Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas.

2) Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Polri yang modern.

/3) Tahun...

3) Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam yanlik Polri yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas.

4) Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi Polri dan budaya kerja Polri yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta sejahtera.

5) Tahun 2029

Inovasi layanan publik kepolisian yang profesional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan platform layanan kepolisian.

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Tahapan Kebijakan Bid TIK Polda NTB

a. Visi

“Terwujudnya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang profesional dan modern”

b. Misi

“Peningkatkan Sarana Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Berdasarkan pernyataan visi dan misi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Bidang TIK Polda NTB yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan dan pembinaan Siskominfo Polri yang terintegrasi, handal dan aman;
- 2) Meningkatkan dan tergelarnya Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- 3) Meningkatkan kemampuan personel Polda NTB di bidang komunikasi dan informasi.

/c. Tujuan...

c. Tujuan

- 1) Pengembangan dan beroperasinya sarana prasarana infrastruktur TIK dan meningkatnya intelektual SDM personel BID TIK Polda NTB;
- 2) Peningkatan integrasi kualitas, kuantitas pengumpulan dan penyajian data Kepolisian dari tingkat pusat sampai ketingkat bawah.

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Bid TIK Polda NTB dalam kurun waktu lima tahun perencanaan (2025-2029) yaitu :

1) Sasaran Inti (SI)

Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdaya guna dan modern dengan

IKU : “Indeks Infrastruktur Strategis TIK”

- a) Indeks infrastruktur SPBE yang profesional dan modern (IKU.1);
- b) Indeks kualitas data Kepolisian yang akuntabel (IKU.2).

2) Sasaran Strategis

- a) Infrastruktur SPBE yang profesional dan modern (SS.1)
- b) Terpenuhi kualitas data Kepolisian yang Akuntabel (SS.2)

Dari kedua sasaran strategis Bid TIK Polda NTB diatas di dukung 4 (empat) Indikator Kinerja Pendukung.

e. Pentahapan Kebijakan

- 1) Tahun 2025
 - a) Penataan organisasi Bidang TIK Polda NTB;
 - b) Menyusun rencana pendalaman materi Bid. TIK yang aplikatif dan diarahkan untuk membentuk anggota Polri yang profesional, memiliki kemahiran dan keterampilan di bidang IT;
 - c) Mewujudkan proses penggelaran Multimedia, jaringan LAN/WAN dan internet di Mapolda NTB dan Polres jajaran dalam rangka meningkatkan kinerja serta SPBE.

/2) Tahun...

- 2) Tahun 2026
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pengembangan sistem pelayanan pengaduan masyarakat melalui Contact Center Polri 110;
 - b) Meningkatkan pemenuhan dan pemeliharaan peralatan Alkomlek yang telah tergelar di kewilayahan untuk mendukung kelancaran operasional Kepolisian;
 - c) Meningkatkan profesionalisme Kepolisian baik perorangan maupun kesatuan melalui penyelenggaraan pendalaman teknologi informasi dan komunikasi yang terprogram.
- 3) Tahun 2027
 - a) Mengembangkan pola kemitraan dengan potensi kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka memberikan bantuan komunikasi untuk mendukung kelancaran tugas operasional Kepolisian;
 - b) Pembangunan sumber daya manusia Bidang TIK Polda NTB melalui proses pendalaman materi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Tahun 2028
 - a) Menerapkan sistem kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan personel Kepolisian di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) Peningkatan mindset dan cultur set anggota Bid TIK Polda NTB sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang demokratis dan mampu melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 5) Tahun 2029
 - a) Meningkatkan proses pemenuhan peralatan Alkomlek untuk mendukung kelancaran komunikasi di kewilayahan;
 - /b) Mewujudkan...

- b) Mewujudkan pembinaan karir berdasarkan merit system dan moral yang di laksanakan secara obyektif, adil dan di dasarkan atas ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek moral, kemampuan, prestasi, dan pendidikan namun tetap tanpa mengorbankan kualitas.

f. Janji Presiden (Asta Cita) di Polri

Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polri adalah:

- 1) penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi *online*, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;
- 2) meningkatkan layanan Kepolisian kepada masyarakat;
- 3) meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;
- 4) melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
- 5) mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan.

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BID TIK

1. Arah Kebijakan dan Strategi Bid TIK

Arah kebijakan dan strategi Bid TIK Polda NTB disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Polda NTB tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri. Arah kebijakan dan strategi Bid TIK Polda Nusa Tenggara barat juga disusun dengan mengkaji terlebih dahulu sarana dan prasarana serta sumber daya manusia baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian di susun dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

/a.Sasaran...

- a. Sasaran Strategis **(SS.1) “Infrastruktur SPBE Profesional dan Modern”** dicapai dengan arah kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
1	Berkembangnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum.	- Mewujudkan pengembangan teknologi Kepolisian dan system informasi yang berkelanjutan dan berintegritas; - Mewujudkan pengembangan pusat informasi keamanan nasional yang terintegrasi ke Mabes polri.
2	Terbangunnya system teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Polda sampai dengan Polres	Mengembangkan system komunikasi berbasis internet/radio untuk mendukung Operasi Kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan disetiap fungsi dan wilayah.
3	Tergelarnya Multimedia dan jaringan VPN-Ip/Internet di satuan kerja di Polda dan satuan kerja di Kewilayahan.	Mengembangkan system komunikasi perkantoran berbasis IP untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polda dan satuan kerja di kewilayahan secara efektif dan efisien;
4	Meningkatnya keterampilan serta pengetahuan personil Bid TIK Polda NTB dan Jajaran serta bertambahnya masa pakai Alkomlek.	- Melakukan reformasi/pengelolaan SDM secara professional sesuai dengan kompetensi dasar SDM dibidang IT. - Meningkatkan kesejahteraan SDM.
5	Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri khususnya di bidang IT	- Mengikut sertakan personel untuk melaksanakan Dikjur/Pelatihan dibidang IT baik di Mabes Polri atau di instansi terkait. - Mengadakan pelatihan kepada personel Bid TIK dan jajaran.

/b. Sasaran...

- b. Sasaran Strategis **(SS.2) “Terpenuhinya Kualitas Data Kepolisian yang Akuntabel”** dicapai dengan arah kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
1	Berkembangnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan informasi data dalam rangka pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum.	- Mewujudkan pengembangan teknologi Kepolisian dan system informasi yang berkelanjutan dan berintegritas; - Mewujudkan pengembangan pusat informasi keamanan data nasional yang terintegrasi ke Mabes polri.
2	Penggelaran Multimedia dan jaringan VPN-Ip/Internet di satuan kerja di Polda dan satuan kerja di Kewilayahan	Mengoptimalkan/menggelar jaringan komunikasi data dan suara sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung system pelaporan Kamtibmas;

2. Kerangka Regulasi

Bid TIK Polda NTB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memerlukan pedoman-pedoman maupun peraturan-peraturan yang mengikat khususnya untuk Satker Bid TIK dan Satker/Satwil Jajaran Polda NTB pada umumnya, hal ini dikarenakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bid TIK Polda NTB berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan perangkat teknologi komunikasi dan informasi Kepolisian. Aturan atau regulasi yang ada pada Bid TIK Polda NTB untuk dipedomani dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Bid TIK Polda NTB tahun 2025-2029, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS/INTI	REGULASI TERKAIT YANG SUDAH	KEBUTUHAN REGULASI	KET
1	2	3	4
Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern	- Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Penggunaan jaringan Interpol (I-24/7) dan jaringan Aseanpol (e-ADS) di Indonesia.	- Perkep tentang penggunaan dan Alokasi Frekuensi Radio di Lingkungan Polri. - Perkap Penggunaan dan Alokasi Internet Protokol (IP) Adress - Perkap pokok Standardisasi Materiil Logistik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	

LAMPIRAN IKEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTBNOMOR : KEP / / II/2026TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
	• Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Penggunaan jaringan Interpol (I-24/7) dan jaringan Aseanpol (e-ADS) di Indonesia • Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.; • Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsus. • Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsus • Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.; • Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Penggunaan jaringan Interpol (I-24/7) dan jaringan Aseanpol (e-ADS) di Indonesia. • UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri; • Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelatihan Polri; • Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri; • Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri • SOP Penyusunan Rencana Strategis; • SOP Penyusunan IKU;	• Perkep tentang penggunaan dan Alokasi Frekuensi Radio di Lingkungan Polri. • Perkap tentang Penggunaan dan Alokasi Internet Protokol (IP) Adress di Lingkungan Polri. • Perkap tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Standardisasi Materiil Logistik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia • Perkep tentang penggunaan dan Alokasi Frekuensi Radio di Lingkungan Polri. • Perkap tentang Penggunaan dan Alokasi Internet Protokol (IP) Adress di Lingkungan Polri. • Perkap tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Standardisasi Materiil Logistik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri; • Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri;	

1	2	3	4
	• SOP Penyusunan Peta Proses Bisnis; • SOP Penyusunan Rancangan Rencana Kerja; • SOP Penyusunan Renja sesuai dengan pagu indikatif; • SOP Pengelolaan Penyusunan RKA-KL; • SOP Penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA); • SOP Pengelolaan Penyusunan LKIP; • SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja; • SOP Membuat laporan standar akreditasi profesi Polri; • SOP Pengusulan Revisi Anggaran; • SOP Penginputan Beban Kerja pada Aplikasi SI-ABK; • SOP Penginputan perencanaan dan anggaran pada aplikasi SIRENA; • SOP Penyusunan PID Satker Bid TIK; • SOP Pengelolaan Administrasi Personel (UKP, UKG, dan Tanhor); • SOP Penyelenggaraan perawatan personel; • SOP Penyelenggaraan administrasi ijin/cuti personel; • SOP Penyelenggaraan pengelolaan Kaporlap personel; • SOP Penyelenggaraan pendataan barang milik negara; • SOP Penyelenggaraan penghapusan barang milik negara; • SOP Penyelenggaraan administrasi pada pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres; • SOP administrasi surat masuk dan keluar;	•	

LAMPIRAN IKEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTBNOMOR : KEP / / /II/2026TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
	• SOP Penyelenggaraan administrasi surat perintah tugas personel; • SOP mengelola aplikasi SIMAK-BMN; • SOP mengelola aplikasi SIPP; • SOP mengelola aplikasi SIPK • SOP pengajuan gaji, uang makan PNS dan uang lembur; • SOP pengajuan tunjangan kinerja; • SOP pelaksanaan realisasi anggaran belanja barang untuk operasional satker; • SOP pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) gaji/belanja pegawai lainnya serta belanja barang; • SOP pelaksanaan pengelolaan pembukuan atau akuntansi; • SOP penyusunan laporan rekonsiliasi; • SOP penyusunan laporan pajak; • SOP pelaksanaan penggelaran/pengoptimalan Frekwensi Jaringan komunikasi dan pengendalian pengalamatan internet protocol (IP); • SOP pelaksanaan Pengolahan tagihan jasa Telekomunikasi; • SOP pelaksanaan pelayanan komunikasi (Zoom meeting/Vicon) • SOP pelaksanaan pengolahan anev pelayanan sistem komunikasi; • SOP pelaksanaan pemasangan baru dan perbaikan jaringan komunikasi/internet jajaran Polda NTB; • SOP pelaksanaan pelayanan/distribusi Alkom dilingkungan Polda NTB; • SOP pengolahan harwat Alkom dan Infrastruktur komunikasi;	•	

LAMPIRAN IKEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTBNOMOR : KEP / / II/2026TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
	• SOP permohonan permintaan data kepada satker dan satwil di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat; • SOP pelaksanaan kegiatan pengumpulan data; • SOP pelaksanaan pengolahan, analisis dan pengkajian data; • SOP pelaksanaan kegiatan penyajian data; • SOP pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi; • SOP pelaksanaan pengajuan pembuatan atau Update Akun E-Mail Polri dengan Domain @Polri.go.id kepada DIV TIK Polri; • SOP pelaksanaan pengajuan Domain Polri.go.id dan Hosting di data center Polri kepada DIV TIK polri; • SOP pelaksanaan dukungan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi; • SOP pelaksanaan dukungan pengamanan data dan informasi; • SOP pelaksanaan dukungan pemsangan dan uji pengoperasian perangkat infrastruktur teknologi informasi; • SOP pelaksanaan sebagai narasumber di bidang teknologi informasi; • SOP pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan TI pada Subbidang teknologi informasi dan komunikasi; • SOP pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan/sosialisasi TI secara daring pada Subbidang teknologi informasi dan komunikasi; • SOP dukungan teknis layanan TI pada Subbidang teknologi informasi dan komunikasi.	•	

3. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polda NTB yang telah ditetapkan. Satker Bid TIK Polda NTB bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi Kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia serta bertanggung jawab kepada Kapolda, tentunya secara konsekuen mengikuti Struktur Kelembagaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri.

Pada Renstra tahun 2025-2029 Bid TIK Polda NTB melakukan penguatan terhadap struktur Kelembagaan sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penambahan personel Bid TIK Polda NTB yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi agar sesuai dengan DSP.
- b. Mengusulkan pengisian jabatan yang kosong pada Bid TIK Polda NTB guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian.
- c. Mengusulkan penambahan anggota yang memiliki kompetensi di bidang teknologi komunikasi dan informasi guna ditempatkan sebagai anggota Sie TI Polres maupun sebagai Operator Alkomlek pada tingkat Sub Sektor.

Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat pada Satker BID. TIK Polda NTB dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia pada Satker BID. TIK Polda NTB di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan pada Satker BID. TIK Polda NTB dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pada Satker BID. TIK Polda NTB dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,

sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polri, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polri.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polda NTB dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat.

Penguatan kelembagaan pada Satker BID. TIK Polda NTB juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran.

STRUKTUR ORGANISASI BID TIK POLDA NTB

KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB

NOMOR : KEP / 7 / II/2026

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026



IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BID TIK POLDA NTB

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Bid TIK Polda Nusa Tenggara Barat, Bid TIK Polda NTB menetapkan 4 (empat) tujuan dan telah dilengkapi dengan 1 (satu) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bid TIK Polda NTB dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari dua Program yang ada. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis Indikator Kinerja Pendukung dapat dilihat di table berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Base Line	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
1		2		3	4	5	6	7	8
SI	Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern	IKU	Indeks infrastruktur strategis TIK (IKU1+IKU2/2)	80% (2,5)	81% (2,6)	84% (2,92)	85% (3,02)	87% (3,13)	89% (3,23)
SS.1	Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern	IKU.1	Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern (ikp1+ikp2/2)	75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
		IKU.2	Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel (ikp3+ikp4/2)	85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)
SS.2	Terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akuntabel	IKP.1	Indeks pengoptimalan/ pengeluaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (10g)	75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
		IKP.2	Indeks Katpuan fungsi TIK (6g)	75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
		IKP.3	Indeks pengumpulan data (150g)	85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)
		IKP.4	Indeks pengolahan dan penyajian data (150g)	85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB

NOMOR : KEP / / /II/2026

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Bid TIK Polda NTB tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, namun pada Satker Bid TIK Polda NTB melaksanakan 2 Program Polri yaitu sebagai berikut:

- 1. Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri;**
- 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.**

2. Kerangka Kinerja.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (RIBU)					ALOKASI	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BID TIK POLDA NTB															
		Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang Berdaya							9.337.131	12.000.000	15.000.000	18.000.000	23.000.000	77.337.131	
		- Indeks Infrastruktur Strategis TIK - Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern - Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel	NTB												
1	Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri khususnya dalam bidang TIK melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas, dan jasa baik kualitas maupun kuantitas	NTB	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	1539.442	3.000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	20.539.442	
5053	Dukma dan Teknik Sarpras	Meningkatkan pelayanan internal Sarpras	NTB	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	1539.442	3.000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	20.539.442	
2	Dukungan Manajemen	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan : a. Jumlah kebijakan layanan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksanaan teknis b. indeks ringar berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu c. Indeks pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat w d. Indeks unit kerja yang menerapkan administrasi secara ak e. Indeks kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelaya f. Indeks hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti g. penyelenggaraan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk memenuhi standar peralatan utama dan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri h. indeks peralatan utama serta peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan Internasional yang dilaksanakan oleh Litbang Polri	NTB	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	7.797.689	9.000.000	11.000.000	13.000.000	16.000.000	56.797.689	
3071	Penyelenggaraan teknologi Informasi	- terlaksananya penyampaian informasi Kepolisian kepada masyarakat - terlaksananya pelayanan teknologi informasi	NTB	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	128.732	200.000	250.000	275.000	325.000	1.178.732	
3073	Duk. Yan Internal Perkantor	- Meningkatkan kualitas pelayanan internal - Terlaksananya layanan internal perkantoran Polri	NTB	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	11ayanan	7.668.957	8.800.000	10.750.000	12.725.000	15.675.000	55.618.957	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB
NOMOR : KEP / / /II/2026
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

3. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta mencapai target sasaran utama Bid TIK Polda NTB, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK). Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara Polri, K/L terkait serta APBD. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIK.	ALOKASI ANGGARAN (RIBU)					ALOKASI 2025-2029	KET
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
	BID TIK POLDA NTB								
		Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang Berdaya	9.337.131	12.000.000	15.000.000	18.000.000	23.000.000	77.337.131	
		- Indeks Infrastruktur Strategis TIK							
		- Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern							
		- Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel							
1	Modernisasi Alarmsus dan Sarana Prasarana Polri	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri khususnya dalam bidang TIK melalui ketersediaan sarana dan prasarana materil, fasilitas, dan jasa baik kualitas maupun kuantitas	1.539.442	3.000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	20.539.442	
5059	Dukma dan Teknik Sarpras	Meningkatkan pelayanan internal Sarpras	1.539.442	3.000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	20.539.442	
2	Dukungan Manajemen	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan :	7.797.689	9.000.000	11.000.000	13.000.000	16.000.000	56.797.689	
		a. Jumlah kebijakan layanan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksanaan teknis							
		b. Indeks rangar berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu							
		c. Indeks pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat w							
		d. Indeks unit kerja yang menerapkan administrasi secara ak							
		e. Indeks kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelaya							
		f. Indeks hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti							
		g. penyelenggaraan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi							
		Kepolisian untuk memenuhi standar peralatan utama dan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri							
		h. indeks peralatan utama serta peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan Internasional yang dilaksanakan oleh Litbang Polri							
3071	Penyelenggaraan teknologi Informasi	- terlaksananya penyampaian informasi Kepolisian kepada masyarakat - terlaksananya pelayanan teknologi informasi	128.732	200.000	250.000	275.000	325.000	1.178.732	
3073	Duk. Yan Internal Perkantor	- Meningkatkan kualitas pelayanan Internal - Terlaksananya layanan internal perkantoran Polri	7.668.957	8.800.000	10.750.000	12.725.000	15.675.000	55.618.957	

V. PENUTUP

Rencana Strategis Bid TIK Polda Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah Bid TIK Polda NTB, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bid TIK Polda NTB dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Bidang TIK Polda NTB yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan dan pembinaan Siskominfo Polri yang terintegrasi, handal dan aman;
- 2) Meningkatkan dan tergelarnya Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- 3) Meningkatkan kemampuan personel Polda NTB di bidang komunikasi dan informasi.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri.

1. Kaidah Pelaksana

- a. Komitmen Bidang TIK Polda NTB pasca reformasi Polri khususnya pada aspek kultur terus berupaya untuk menampilkan postur yang berorientasi pada pelayanan secara pro aktif kepada seluruh Satker Jajaran Polda NTB;
- b. Membangun kemitraan dengan Lembaga / Departemen terkait dalam sistem sinergi kemitraan inter departemen serta seluruh komponen Satker Jajaran Polda NTB dalam rangka menciptakan pelaporan data secara online yang transparan dan akuntabel;
- c. Menghadapi situasi perkembangan kedepan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dengan sasaran meminimalkan terjadinya penyimpangan dan efisiensi anggaran;
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, proporsional dan profesional.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB
NOMOR : KEP / / /II/2026
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

2. Autentifikasi dan Distribusi

- a. Autentifikasi, RENSTRA Bid TIK Polda NTB merupakan jabaran dari RPJMN dan disahkan oleh Kabid TIK sebagai pimpinan Satker sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. Distribusi, selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan dituangkan dalam rencana tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 18 Februari 2026



KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB

YAYAN HARTADI, S.I.K.

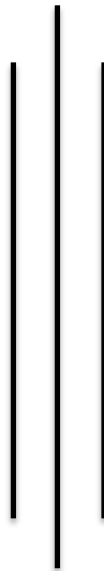
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB
NOMOR : KEP / 1 / II/2026
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026



RENCANA STRATEGIS BIDANG TIK POLDA NTB TAHUN 2025 – 2029



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB
Nomor: Kep/ 18 /II/REN./2025, Tanggal 25 Februari 2025



LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS BID TIK POLDA NTB TAHUN 2025 – 2029

- (1) MATRIKS BANGKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB
- (2) MATRIK HARKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB
- (3) MATRIKS BANGKUAT PERSONEL BID TIK POLDA NTB
- (4) MATRIK HARKUAT PERSONEL BID TIK POLDA NTB
- (5) MATRIK GUNKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB
- (6) MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN BID TIK POLDA NTB



RENCANA STRATEGIS

BIDANG

TEKNOLOGI

INFORMASI

DAN

KOMUNIKASI



TAHUN 2025 - 2029

MATARAM

Februari

2026

DAFTAR ISI

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2020

KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB TENTANG RENCANA STRATEGIS BID TIK POLDA NTB TAHUN 2020-2024	
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	2
B. POTENSI	3
C. ANALISA SWOT	4
D. PERMASALAHAN	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SATRATEGIS	6
A. VISI	10
B. MISI	10
C. TUJUAN	11
D. SASARAN STRATEGIS	11
E. KETERTARIKAN IMPACT	11
F. PENTAHAPAN KEBIJAKAN	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	18
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	25
B. KERANGKA REGULASI	26
C. KERANGKA KELEMBAGAAN	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
A. TARGET KINERJA	45
B. KERANGKA PENDANAAN	46
BAB V PENUTUP	51
A. KAIDAH PELAKSANAAN	52
B. AUTENTIFIKASI DAN DISTRIBUSI	52
LAMPIRAN	
1. MATRIKS BANGKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB	
2. MATRIK HARKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB	
3. MATRIKS BANGKUAT PERSONEL BID TIK POLDA NTB	
4. MATRIK HARKUAT PERSONEL BID TIK POLDA NTB	
5. MATRIK GUNKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB	
6. MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN BID TIK POLDA NTB	

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB
NOMOR : KEP / / /II/2026



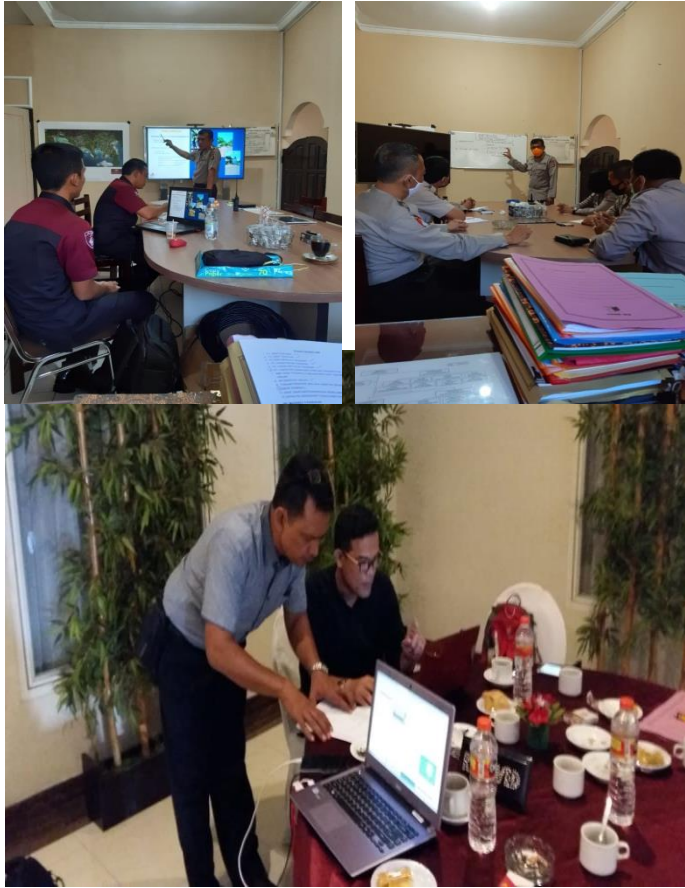
Ringkasan Eksekutif

Sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri perlu memberikan jaminan kepada masyarakat akan keamanan dan ketertiban nasional.

1. MATRIKS BANGKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB
2. MATRIK HARKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB
3. MATRIKS BANGKUAT PERSONEL BID TIK POLDA NTB
4. MATRIK HARKUAT PERSONEL BID TIK POLDA NTB
5. MATRIK GUNKUAT MATERIIL BID TIK POLDA NTB

Dalam rangka memberikan jaminan keamanan dan ketertiban nasional kepada masyarakat, Polri menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA Bid TIK Polda NTB digunakan sebagai rencana lima tahunan 2020-2024 untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan disertai dengan indicator indicator pengukurnya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB
NOMOR : KEP / / /II/2026
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026



“Perencanaan yang baik adalah langkah awal dalam keberhasilan, perencanaan dan usaha yang baik tidak pernah mengkhianati hasil.”



Dalam mencapai tujuan tersebut harus ada pemikiran, sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang tulus. Serta kerja keras.

RENSTRA Bid TIK Polda NTB 2020-2024 ini merupakan RENSTRA tahap akhir dari Grand Strategi Polri 2025- 2045 yang sudah masuk pada tahap Excellence. RENSTRA Bid TIK Polda NTB sebelumnya menekankan pada pemantapan kelembagaan dan pelayanan Polri kearah professional dan modern. Implementasi RENSTRA sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai visi dan misi yang ditetapkan dalam RENSTRA tersebut, meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan.

Sebagai kelanjutan RENSTRA sebelumnya, RENSTRA Bid TIK Polda NTB 2025-2029 menekankan pada peran Polri yaitu sebagai fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal di atas maka RENSTRA Bid TIK Polda NTB dirancang dengan melihat kondisi umum Polda NTB yaitu capaian kinerja dari RENSTRA sebelumnya, tugas dan fungsi Polri, kondisi keamanan dan peranan Institusi Polri.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB
NOMOR : KEP / / /II/2026
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script. The signature is positioned horizontally, with a vertical line intersecting it near the center. The ink is dark and the strokes are fluid.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bidang Teknologi informasi dan Komunikasi Polda NTB (Bid TIK) 2025-2029 dapat tersusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Susunan Renstra Bid TIK Polda NTB 2025-2029 disusun berdasarkan pengembangan Rancangan Rencana Strategis Bid TIK Polda NTB 2025-2029 yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bid TIK Polda NTB yang menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis Daerah Nusa Tenggara Barat.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Bid TIK Polda NTB 2025-2029. Kami harap seluruh target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA ini dapat tercapai sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat Nusa Tenggara Barat meningkat dan terpelihara.



Mataram, Februari 2026

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB

YAYAN HARTADI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

PENJELASAN PENGUKURAN MANUAL IKU, IKP BID TIK POLDA NTB

A. Manual Indikator Kinerja Bid TIK Polda NTB

Setiap indikator kinerja yang digunakan dalam proses pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi strategi organisasi, perlu dilengkapi dengan **Manual Indikator Kinerja**. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup, antara lain: definisi, formula, polarisasi, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.

1. Manfaat dari penyusunan Manual Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pemahaman yang sama tentang apa yang diukur oleh indikator kinerja tersebut dan target yang telah menjadi konsesus untuk dicapai pada suatu periode waktu tertentu;
 - b. memberikan informasi tentang area kinerja yang perlu dibenahi ketika kinerja tidak mencapai hasil yang diharapkan.
2. Elemen Dalam Manual Indikator Kinerja
Terdapat sejumlah elemen dalam Manual Indikator Kinerja yang secara keseluruhan memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu indikator kinerja, sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja: pada bagian ini dicantumkan nama dari indikator kinerja yang digunakan;
 - b. Definisi: bagian ini berisi definisi dari indikator kinerja, termasuk pengertian sejumlah istilah yang muncul dalam definisi tersebut;
 - c. Formula: Bagian ini menjabarkan formula yang digunakan untuk menghitung nilai indikator kinerja. Formula diperlukan apabila indikator kinerja dihitung berdasarkan sejumlah variabel parameter, atau merupakan agregasi dari indikator sejenis di tingkat wilayah;

/d. Target...

- d. Target kinerja: bagian ini berisikan target dari indikator kinerja untuk kurun waktu 2025-2029, sesuai dengan periode Renstra Bid TIK Polda NTB;
- e. Satuan pengukuran: besaran yang menunjukkan kuantitas dari target dan realisasi capaian indikator kinerja;
- f. Polarisasi: bagian yang menunjukkan arah capaian indikator kinerja yang kita harapkan. Polarisasi *maximize* berarti semakin besar nilai realisasi berarti semakin baik, sedangkan polarisasi *minimize* bermakna sebaliknya, semakin kecil nilai realisasi semakin baik;
- g. Periode pemantauan: bagian ini diisi dengan periode di mana pemantauan kinerja dilakukan, karena akan digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi, maka setidaknya periode pengukuran adalah triwulanan;
- h. Dimensi: menunjukkan rumpun dimana indikator kinerja tersebut berada, yakni infrastruktur SPBE, kualitas data Kepolisian dan Kinerja Penunjang;
- i. Sumber data: entitas yang memberikan atau menghasilkan data kinerja yang diperlukan untuk suatu indikator kinerja. Satu indikator kinerja dapat memiliki beberapa sumber data. Sumber data dapat berupa unit kerja di internal Polri atau organisasi di luar Polri;
- j. Penghimpun data: Satuan Kerja yang bertugas untuk menghimpun data realisasi untuk indikator kinerja, dari entitas yang menjadi sumber data;
- k. Pengampu akuntabilitas: Satuan Kerja atau unit organisasi yang diukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja ini;
- l. Pengesahan: tempat ditandatanganinya Manual Indikator Kinerja oleh pejabat yang berwenang dari unit organisasi yang menjadi penghimpun data atau sebagai pengampu akuntabilitas dari indikator kinerja.

/B.Cakupan...

B. Cakupan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Bid TIK Polda NTB 2025-2029. Tabel berikut berisikan Sasaran Strategis Bid TIK Polda NTB dalam Renstra 2025-2029 beserta indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang berada pada kluster SSI dan SS1 merupakan **IKU**. Sedangkan indikator kinerja yang berada pada kelompok SS2 disebut dengan **IKP**.

Tabel Sasaran Strategis dan indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
1		2	
SI	Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern	IKU	Indeks infrastruktur strategis TIK (IKU1+IKU2/2)
SS.1	Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern	IKU.1	Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern (ikp1+ikp2/2)
		IKU.2	Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel (ikp3+ikp4/2)
SS.2	Terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akuntabel	IKP.1	Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (10g)
		IKP.2	Indeks Katpuan fungsi TIK (6g)
		IKP.3	Indeks pengumpulan data (150g)
		IKP.4	Indeks pengolahan dan penyajian data (150g)

C. Tipe *Template* Indikator Kinerja

Terdapat 2 (dua) tipe *template* Manual Indikator Kinerja: (1) *template* untuk indikator kinerja yang menjadi induk dari indikator kinerja lain, dan (2) *template* untuk indikator kinerja yang bersifat independen, yang mana merupakan subordinat dari indikator kinerja induk. Indikator kinerja yang bersifat induk membutuhkan nilai indeks dari indikator kinerja lain untuk menghitung nilai indeks dirinya. Untuk indikator kinerja yang bersifat independen, nilai indeksnya dihitung secara independen atau mandiri.

Dalam dokumen ini, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan induk dari indikator kinerja lain, yakni: Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern, Infrastruktur SPBE yang profesional dan modern, dan terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang akuntabel.

/Masing...

Masing-masing jenis indikator kinerja ini memiliki *template* yang berbeda untuk tabel perhitungan angka indeks.

1. Indeks infrastruktur strategis TIK (IKU)

INDIKATOR KINERJA	IKU.SI. INDEKS INFRASTRUKTUR STRATEGIS TIK					
Indeks Infrastruktur Strategis TIK merupakan nilai total dari seluruh indikator kinerja pendukung dengan pembagian masing-masing IKP pada Satker Bid TIK Polda NTB.	Indeks Infrastruktur Strategis TIK mengukur kemampuan organisasi untuk menerapkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan inovasi, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan data digital dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktifitas, dan efisiensi kerja.					
	Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital.					
	Indeks Infrastruktur Strategis TIK menggunakan data dari indikator kinerja berikut:					
	- Indeks pengoptimalan/penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet - Indeks Katpuan fungsi TIK - Indeks pengumpulan data - Indeks pengolahan, penyajian data					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	80% (2,5)	81% (2,6)	84% (2,92)	85% (3,02)	87% (3,13)	89% (3,23)
Formula	Karakteristik					
$I = \frac{T}{2}$ Keterangan : I : Indeks Infrastruktur Startegis TIK T : Indeks Total IKU.1 dan IKU,2	Satuan pengukuran		Polarisasi			
	Indeks		Maksimal			
	Dimensi		Periode Pemantauan			
	Kinerja Utama		Tahunan			
	Sumber Data					
	Satker jajaran Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
	Seluruh Subbid/Subbag Pada Satker Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data			Pengesahan		
	Subbidtekinfo					

Konversi nilai indikator ke indeks (skala1-5)	1,0 - < 2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
Indeks Infrastruktur Strategis TIK	<75%	75% - <85%	85% - <90%	90% - <95%	≥95%

/2. Indeks ...

2. Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan Modern (IKU.1)

INDIKATOR KINERJA	IKU.1 - SS.1. INDEKS INFRASTRUKTUR SPBE YANG PROFESIONAL DAN MODERN					
Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern merupakan nilai dari indikator kinerja pendukung dengan pembagian masing-masing IKP pada sasaran strategis pertama Satker Bid TIK Polda NTB.	Indeks Infrastruktur SPBE yang profesional dan modern mengukur kemampuan organisasi untuk menerapkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan inovasi, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan data digital dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktifitas, dan efisiensi kerja. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital. Indeks Infrastruktur Strategis TIK menggunakan data dari indikator kinerja berikut: - Indeks pengoptimalan/penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet - Indeks Katpuan fungsi TIK					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
Formula	Karakteristik					
$ii = \frac{I.Ops + IK}{2}$ Keterangan : ii : Indeks Infrastruktur SPBE yang profesional dan modern I.Ops = Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet IK = Indeks Katpuan Fungsi TIK	Satuan pengukuran		Polarisasi			
	Indeks		Maksimal			
	Dimensi		Periode Pemantauan			
	Kinerja Utama		Tahunan			
	Sumber Data					
	Satker jajaran Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
	Seluruh Subbid/Subbag Pada Satker Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data			Pengesahan		
	Subbidtekinfo					

Konversi nilai indikator ke indeks (skala1-5)	1,0 - < 2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
Indeks Infrastruktur Strategis TIK	<75%	75% - <85%	85% - <90%	90% - <95%	≥95%

/3. Indeks...

3. Indeks Kualitas Data Kepolisian yang Akuntabel (IKU.2)

INDIKATOR KINERJA	IKU.2 – SS.2. INDEKS KUALITAS DATA KEPOLISIAN YANG AKUNTABLE					
Indeks kulaitas data Kepolisian yang akuntable merupakan nilai dari indikator kinerja pendukung dengan pembagian masing-masing IKP pada sasaran strategis pertama Satker Bid TIK Polda NTB.	Indeks kualitas data Kepolisian yang akuntable mengukur kegiatan pengumpulan data dan penyajian data yang bertujuan memperoleh serta mendapatkan data serta menyajikan data yang valid sehingga terwujudnya pengembangan data yang berbasis IT dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktifitas, dan efisiensi kerja. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital. Indeks Infrastruktur Strategis TIK menggunakan data dari indikator kinerja berikut: - Indeks pengumpulan data - Indeks pengolahan dan penyajian data					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)
Formula	Karakteristik					
$P_j = \frac{I.Pul.D + IJD}{2}$ Keterangan : P_j = Indeks kualitas data Kepolisian yang akuntable I.Pul.D = Indeks pengumpulan data IJD = Indeks pengolahan dan penyajian data	Satuan pengukuran		Polarisasi			
	Indeks		Maksimal			
	Dimensi		Periode Pemantauan			
	Kinerja Utama		Tahunan			
	Sumber Data					
	Satker jajaran Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
	Seluruh Subbid/Subbag Pada Satker Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data			Pengesahan		
	Subbidtekinfo					

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)	1,0 - < 2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
Indeks Infrastruktur Strategis TIK	<75%	75% - <85%	85% - <90%	90% - <95%	≥95%

/4. Indeks....

4. Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (IKP.1)

INDIKATOR KINERJA	SS.1 IKP.1 : Indeks Pengoptimalan/Penggelaran Alkomlek, Multimedia dan Jaringan VPN-IP/Internet					
Indeks pengoptimalan/ penggelaran jaringan Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/Internat, sehingga beroperasinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Polda NTB	Indeks pengoptimalan/penggelaran jaringan Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/Internat untuk mengukur sejauhmana perkembangan infrastruktur IT dalam mendukung operasi Kepolisian di wilayah hukum Polda NTB. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat ketersediaan sarana dan prasarana IT dalam mendukung operasi Kepolisian di wilayah hukum Polda NTB. Indeks Indeks pengoptimalan/penggelaran jaringan Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/Internat menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Rencana jumlah dukungan anggaran dan kegiatan pengoptimalan/ penggelaran (10 Giat) • Realisasi jumlah dukungan anggaran dan kegiatan pengoptimalan/ penggelaran					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
Formula		Karakteristik				
I.Ops = (RLG : RNG) x 100% <u>Keterangan :</u> I.Ops = Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet RLG = Realisasi jumlah dukgar dan kegiatan pengoptimalan/ penggelaran RNG = Rencana jumlah dukgar dan kegiatan pengoptimalan/ penggelaran		Satuan pengukuran		Polarisasi		
		Indeks		Maksimal		
		Dimensi		Periode Pemantauan		
		Kinerja Penunjang		Tahunan		
		Sumber Data				
		Satker jajaran Polda NTB				
		Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan	
		Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran				
		Penghimpun Data			Pengesahan	
		Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran				

Konversi nilai indikator ke indeks (skala1-5)	1,0 - < 2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet	<75%	75% - <85%	85% - <90%	90% - <95%	≥95%

/5. Indeks...

5. Indeks Katpuan Fungsi TIK (IKP.2)

INDIKATOR KINERJA	SS.1 IKP.2 : Indeks Katpuan Fungsi TIK					
Indeks peningkatan kemampuan bidang IT sehingga meningkatnya keterampilan atau pengetahuan anggota Polri/PNS Polri di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Indeks peningkatan kemampuan fungsi TIK untuk mengukur sejauhmana perkembangan profesionalisme dan keterampilan anggota Bid TIK dalam mengoperasikan infrastruktur IT. Indeks peningkatan kemampuan fungsi TIK menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Rencana jumlah dukungan anggaran dan kegiatan katpuan fungsi TIK (6 giat). • Realisasi jumlah dukungan anggaran dan kegiatan katpuan fungsi TIK.					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
Formula		Karakteristik				
IK = (RLG : RNG) x 100% <u>Keterangan :</u> IK = Indeks Katpuan Fungsi TIK RLK = Realisasi jumlah dukgar dan kegiatan katpuan fungsi TIK RNK = Rencana jumlah dukgar dan kegiatan katpuan fungsi TIK	Satuan pengukuran		Polarisasi			
	Indeks		Maksimal			
	Dimensi		Periode Pemantauan			
	Kinerja Penunjang		Tahunan			
	Sumber Data					
	Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas		Pengesahan			
	Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data		Pengesahan			
Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran						

Konversi nilai indikator ke indeks (skala1-5)	1,0 - < 2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
Indeks Katpuan fungsi TIK	<75%	75% - <85%	85% - <90%	90% - <95%	≥95%

/6. Indeks...

6. Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data (IKP.3)

INDIKATOR KINERJA	SS.2 IKP.3 : Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data					
Indeks kegiatan pengumpulan data adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh serta mendapatkan data yang valid sehingga terwujudnya pengembangan data yang berbasis IT yang professional dan modern.	Indeks pengumpulan data untuk mengukur sejauhmana perkembangan data-data penting kepolisian yang terukur dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan. Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Rencana jumlah pengumpulan data (150 giat). • Realisasi jumlah pengumpulan data.					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)
Formula	Karakteristik					
I.Pul.D = (RLG : RNG) x 100% <u>Keterangan :</u> I.Pul.D = Indeks pengumpulan data RLD = Realisasi pengumpulan data RND = Rencana pengumpulan data	Satuan pengukuran		Polarisasi			
	Indeks		Maksimal			
	Dimensi		Periode Pemantauan			
	Kinerja Penunjang		Tahunan			
	Sumber Data					
	Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas		Pengesahan			
	Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data		Pengesahan			
	Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					

Konversi nilai indikator ke indeks (skala1-5)	1,0 - < 2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
Indeks pengumpulan data	<75%	75% - <85%	85% - <90%	90% - <95%	≥95%

/7. Indeks...

7. Indeks Pengolahan dan Penyajian Data (IKP.4)

INDIKATOR KINERJA		SS.2 IKP.4 : Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data					
Indeks kegiatan pengolahan dan penyajian data adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh dan mendapatkan data yang valid serta menyajikan data-data yang valid sehingga terwujudnya pengembangan data yang berbasis IT yang professional dan modern dalam membantu pimpinan mengambil keputusan		Indeks pengolahan dan penyajian data untuk mengukur sejauhmana perkembangan dan menyajikan data-data penting kepolisian yang terukur dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan. Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Rencana jumlah pengolahan dan penyajian data (150 giat). • Realisasi jumlah pengolahan dan penyajian data.					
Target Kinerja		Base line	2025	2026	2027	2028	2029
		85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)
Formula		Karakteristik					
IJD = (RLJ : RNJ) x 100% Keterangan : IJD = Indeks pengolahan dan penyajian data RLJ = Realisasi pengolahan dan penyajian data RNJ = Rencana pengolahan dan penyajian data		Satuan pengukuran			Polarisasi		
		Indeks			Maksimal		
		Dimensi			Periode Pemantauan		
		Kinerja Penunjang			Tahunan		
		Sumber Data					
		Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB					
		Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
		Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
		Penghimpun Data			Pengesahan		
		Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					

Konversi nilai indikator ke indeks (skala1-5)	1,0 - < 2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
Indeks pengolahan dan penyajian data	<75%	75% - <85%	85% - <90%	90% - <95%	≥95%

Penutup

Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Bid TIK Polda NTB 2025-2029. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup cara menghitung capaian kinerja Bid TIK Polda NTB, antara lain: definisi, formula, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 18 Februari 2026

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB

YAYAN HARTADI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KABID TIK POLDA NTB TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BID TIK POLDA NTB TAHUN 2020-2024

Daftar isi	i
1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SATRATEGIS	1
a. Visi	1
b. Misi	1
c. Tujuan	1
d. Sasaran Strategis	1
e. Keterkaitan Impact	2
2. Peta Strategis – Renstra Bid TIK Polda NTB 2025-2029	2
3. Target Capaian Renstra Bid TIK Polda NTB 2025-2029	3
4. IKU, IKP dan Manual Renstra BID TIK Polda Ntb 2025 – 2029	4
a. Indeks infrastruktur strategis TIK	4
b. Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan Modern	5
c. Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet	6
d. Persentase kebutuhan Alkomlek	7
e. Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel	8
f. Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data	
g. Indeks Pengolahan dan Penyajian Data	9

LAMPIRAN

Sprin

LAMPIRAN



LAMPIRAN



PETA STRATEGIS, IKU, IKP RENSTRA (REVISI)

(INFRASTRUKTUR TIK STRATEGIS KEPOLISIAN YANG BERDAYA GUNA DAN MODERN)

BIDANG

TEKNOLOGI

INFORMASI

DAN

KOMUNIKASI



TAHUN 2025 – 2029

MATARAM

Februari

2026

6. MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN BID TIK POLDA NTB 2025-2029

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (RIBU)					ALOKASI 2025-2029	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BID TIK POLDA NTB														
		Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang Berdayaguna dan Modern - Indeks Infrastruktur Strategis TIK - Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern - Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel	NTB						9,337,131	12,000,000	15,000,000	18,000,000	23,000,000	77,337,131	
1	Modernisasi Almtsus dan Sarana Prasarana Polri	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri khususnya dalam bidang TIK melalui ketersediaan sarana dan prasarana materii, fasilitas, dan jasa baik kualitas maupun kuantitas	NTB	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1,539,442	3,000,000	4,000,000	5,000,000	7,000,000	20,539,442	
5059	Dukma dan Teknik Sarpras	Meningkatkan pelayanan internal Sarpras	NTB	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1,539,442	3,000,000	4,000,000	5,000,000	7,000,000	20,539,442	
2	Dukungan Manajemen	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan : a. Jumlah kebijakan layanan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksanaan teknis b. indeks rengar berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu c. Indeks pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu d. Indeks unit kerja yang menerapkan administrasi secara aktual e. Indeks kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal f. Indeks hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti g. menyelenggaraan pengkajian , penelitiandan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk memenuhi standar peralatan utama dan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri h. indeks peralatan utama serta peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan Internasional yang dilaksanakan oleh Litbang Polri	NTB	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	7,797,689	9,000,000	11,000,000	13,000,000	16,000,000	56,797,689	
3071	Penyelenggaraan teknologi Informasi	- terlaksananya penyampaian informasi Kepolisian kepada masyarakat - terlaksananya pelayanan teknologi informasi	NTB	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	128,732	200,000	250,000	275,000	325,000	1,178,732	
3073	Duk Yan Internal Perkantoran	- Meningkatkan kualitas pelayanan Internal - Terlaksananya layanan internal perkantoran Polri	NTB	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	7,668,957	8,800,000	10,750,000	12,725,000	15,675,000	55,618,957	



Malam, 25 Februari 2025
KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB

YAYAN HARTADI, S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520